

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tuntutan tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran saja, akan tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk *good governance*.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya terkait dengan pelaporan, tetapi juga melibatkan transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik.

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena seluruh kegiatan keuangan merupakan bentuk penggunaan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu semua tahapan dalam pengelolaan

keuangan daerah perlu dilaksanakan secara transparan, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencerminkan akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD mengenai kegagalan atau keberhasilan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah tetapi juga berhak menuntut jika ada yang tidak sesuai atas penggunaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Meskipun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, opini tersebut hanya menandakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tanpa menunjukkan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal.

Bukti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul masih bermasalah yang pertama, status "Rentan" Kabupaten Bantul pada SPI 2024 mencerminkan lemahnya akuntabilitas kejujuran dan hukum, karena menggambarkan tingginya risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik. Temuan BPK terkait pelaksanaan anggaran,

pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset daerah mencerminkan lemahnya akuntabilitas proses, karena menunjukkan belum memadainya sistem informasi akuntansi dan prosedur administrasi. Sementara itu, rendahnya aksesibilitas laporan keuangan OPD (baru 54,39% berkategori informatif) mencerminkan lemahnya akuntabilitas kebijakan, karena pemerintah daerah belum sepenuhnya terbuka dan bertanggung jawab atas informasi keuangan kepada masyarakat.

Dari permasalahan tersebut maka tiga faktor utama yang secara langsung terkait dengan variabel yang akan diteliti. Pertama, kelemahan dalam kualitas laporan keuangan yang dibuktikan dengan masih adanya temuan kesalahan pencatatan aset dari BPK dan KPK, karena aset merupakan elemen utama pada neraca sehingga kesalahan pencatatannya akan memengaruhi keakuratan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, rendahnya aksesibilitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh data Komisi Informasi Daerah DIY per Februari 2024 bahwa hanya 54,39% OPD di Kabupaten Bantul yang telah mencapai kategori informatif, yang menandakan akses publik terhadap informasi keuangan daerah belum optimal. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan sebagaimana ditunjukkan oleh skor dimensi manajemen SDM dalam SPI KPK 2024 yang hanya mencapai 71,82, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Faktor utama yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi tentang keuangan atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Bastian 2010, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah. Menurut Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan daerah dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

Faktor ketiga yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi merupakan sifat dasar individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerjanya dalam menjalankan tugas. Dalam

konteks keuangan daerah, kompetensi SDM mencerminkan kemampuan aparatur meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengelola keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Kompetensi SDM yang kuat akan memperkuat proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara tepat, akurat, serta tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan variabel kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian Defana dan Rahayu (2023), disebutkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penelitian Eviana dan Kristianto (2026) menyebutkan kualitas laporan keuangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purba dkk (2021) disebutkan bahwa penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya penelitian yang dilakukan Herlina dkk (2021) yang menyatakan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Hal serupa

dinyatakan pada penelitian yang dilakukan oleh Muttaqien dkk (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Somad dkk (2023) yang mengatakan bahwa penyajian dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetapi aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Lhokseumawe.

Adanya ketidakkonsistenan hasil dan kesimpulan dalam penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan subjek yang berbeda yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Bantul menghadapi permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun di sisi lain KPK menetapkan status “Rentan” dengan nilai SPI 70,94 serta menyoroti ketidaktepatan pencatatan aset dan kurangnya transparansi keuangan. Situasi ini menjadi lebih serius karena presentasi OPD yang berstatus informatif masih rendah, hanya 54,39% dan skor dimensi manajemen

SDM mencapai 71,82, menandakan bahwa kompetensi sumber daya manusianya harus di tingkatkan.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel independen yang berhubungan langsung dengan isu tersebut. Variabel kualitas laporan keuangan dipilih karena terdapat temuan ketidaktepatan pencatatan aset yang berpengaruh pada keakuratan neraca daerah. Variabel aksesibilitas laporan keuangan dipilih mengingat tingkat OPD informatif yang masih rendah, menandakan keterbukaan informasi keuangan kepada publik belum optimal. Selanjutnya variabel kompetensi sumber daya manusia, karena nilai manajemen SDM sebesar 71,82 serta temuan kelemahan pengendalian internal BPK yang menandakan kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan meneliti variabel-variabel serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, aksesibilitas informasi keuangan, serta kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar

tercipta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

